

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, JUMLAH PENDUDUK, PAD, IPM, DAN UMK TERHADAP KETIMPANGAN DI PROVINSI BANTEN

Rosita Juliana, Aris Soelistyo

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

*Corresponding author: rositajuliana99@gmail.com

Artikel Info

Article history:

Received 16 April 2019

Revised 20 April 2019

Accepted 19 May 2019

Available online 20 May 2019

Keyword: : *per capita PDRB, population, PAD, IPM, UMK, Inequality*

JEL Classification

<https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel>

Abstract

This study aims to analyze the effect of per capita GRDP, population, PAD, UMK and IPM on inequality in Banten Province in 2010-2016. The type of data used in this study is secondary data in the form of panel data consisting of seven-year time series, namely 2010-2016 which consists of 8 districts / cities in Banten Province, meanwhile, the data analysis used in this study is the FEM method. (Fixed Effect Model). The results of this research, among others. First, the inequality of development 2010-2016 year in Banten Province experiencing fluctuations in each year. Second, GDP per capita, population, and significant influential PAD against inequality. Third, the IPM and the UMK insignificant against inequality. And third, the coefficient of Determination (R²) of 0.998990 or 99.89%. This indicates that the traffic free variables i.e. GDP per capita, population, PAD, IPM and the UMK explain variables bound Inequalities of 99.89% and the rest of 0.11% can be explained by other variables.

PENDAHULUAN

Setiap negara di dunia memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan seluruh rakyatnya melalui peningkatan pembangunan ekonomi di suatu negara. Untuk mengetahui perkembangan pembangunan ekonomi dan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakatnya, maka perlu diketahui tingkat pertumbuhan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita. IPM yang terjadi pada suatu wilayah juga dapat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah tersebut. Dengan adanya peningkatan PAD juga dapat mengurangi ketimpangan pembangunan. Institusional ekonom berpendapat bahwa upah minimum dapat mengurangi ketimpangan. Dengan menetapkan upah minimum, maka standar upah akan lebih tinggi dan menciptakan distribusi upah dan pendapatan yang lebih tinggi dan menciptakan distribusi upah dan pendapatan yang lebih adil (Bluestone dan Harrison, 2001). Jadi, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, PAD, IPM, dan UMK dapat mempengaruhi ketimpangan suatu wilayah.

Di Provinsi Banten sudah ada kelas bermain untuk anak-anak balita, perguruan tinggi berstandar Internasional, sekolah khusus orang asing, dan lembaga pendidikan dengan biaya yang hitungannya menggunakan dollar AS. Akan tetapi, di Banten tercatat angka putus sekolah yang tinggi, dan adanya buta huruf. Pelaksana Tugas Gubernur Banten menyatakan sedikitnya ada setengah juta penduduk Banten yang buta aksara. Ketidakmampuan penduduk mengenal abjad bisa jadi karena kemiskinan. Tahun 2006, di Provinsi Banten tercatat 702.000 keluarga miskin yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Jumlah ini setara dengan 34,2 persen dari total penduduk di Provinsi Banten. Penduduk yang belum memiliki rumah layak huni sebanyak 750.000 penduduk (49,3 persen). Berbagai kebijakan dan program penganggulangan kemiskinan sudah dilaksanakan. Salah satunya adalah pemberdayaan menuju desa dan kelurahan mandiri dengan melalui program bantuan keuangan pemerintah desa dan kelurahan.

Ketimpangan merupakan hal umum yang terjadi dalam perekonomian suatu daerah. Ketimpangan dapat terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi pada masing-masing daerah. Oleh karena itu terdapat daerah maju dan daerah terbelakang di setiap daerahnya. Menurut Kuncoro (2006), ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif terhadap masyarakat, karena ketimpangan antar wilayah adalah adanya perbedaan faktor anugrah awal.

Pembangunan ekonomi yaitu proses terjadinya kenaikan pendapatan perkapita masyarakat yang berlangsung dalam jangka panjang. Dalam teori pembangunan terdapat 3 unsur yang harus ada yaitu proses, peningkatan pendapatan perkapita, dan berlangsung terus menerus dalam jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan suatu kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Untuk mengetahui perkembangan pembangunan ekonomi suatu negara dan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakatnya, maka perlu diketahui tingkat pertumbuhan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Besarnya pendapatan nasional akan menentukan besarnya pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita sering dijadikan patokan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara.

IPM dengan ketimpangan pembangunan yang terjadi pada suatu wilayah dapat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah tersebut. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitas dan hasilnya ekonomi akan bertambah lebih tinggi. Teori tersebut sesuai dengan teori human capital, yaitu apabila pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi ketimpangan pembangunan dikarenakan pendidikan berperan didalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja (Jhingan, 2010).

Intitusional ekonom berpendapat bahwa upah minimum dapat mengurangi ketimpangan. Upah minimum meredistribusi pendapatan dengan menurunkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan upah pekerja terendah (Levitan & Belous, 1979 ; Volscho, 2005). Dengan demikian dengan menetapkan upah minimum, amak standar upah akan lebih tinggi dan menciptakan distribusi upah dan pendapatan yang lebih tinggi dan

menciptakan distribusi upah dan pendapatan yang lebih adil (Bluestone dan Harrison, 2001).

PAD merupakan faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan. Menurut Siddik (2002) kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan pendapatan sangat beragam, tergantung kondisi masing-masing daerah yang bersangkutan apakah memiliki kekayaan sumber daya atau tidak. Atau daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah. Akibat dari perbedaan tersebut kemampuan suatu daerah dalam proses pembangunan menjadi berbeda.

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat dimana melibatkan unsur jumlah penduduk dalam perhitungan. Jumlah penduduk yang tinggi di suatu daerah tidak menjadi masalah selama produktivitas penduduk daerah yang bersangkutan juga tinggi, sehingga tidak menyebabkan ketimpangan. Permasalahan akan muncul ketika jumlah penduduk yang tinggi diikuti dengan pengangguran dan kemiskinan yang akan berakibat terhadap ketimpangan.

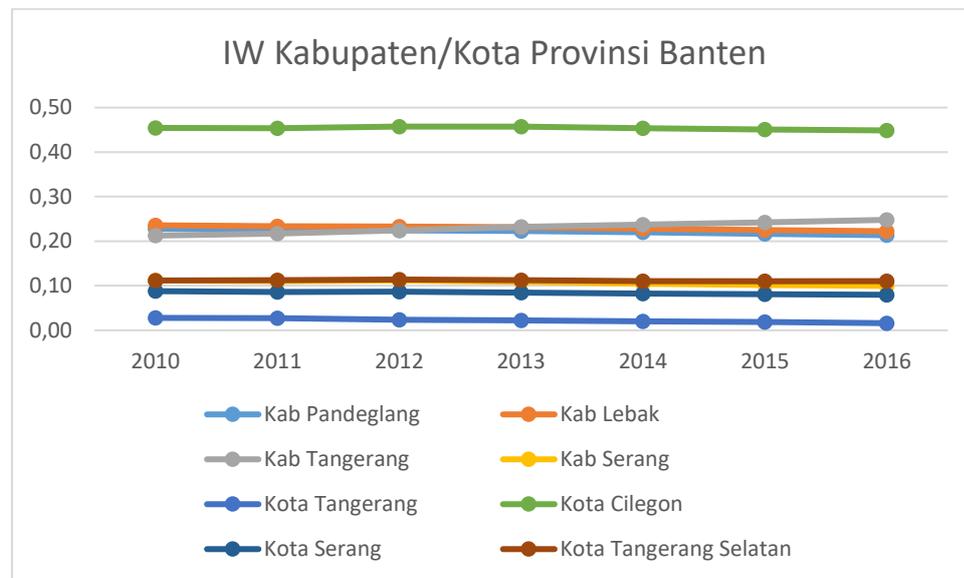
METODE PENELITIAN

Jenis data yang dipakai dalam metode penelitian ini sendiri adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif. Definisi dari data sekunder adalah data yang didapat dari sumber-sumber terdahulu yang telah melakukan suatu penelitian-penelitian terdahulu dan cara memperoleh datanya bisa didapatkan melalui media seperti publikasi, website dll. Data yang diperoleh dari BPS Publikasi dalam angka di Provinsi Banten yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 4 Kota dengan interval waktu selama 7 tahun dari tahun 2010-2016. Jenis populasi penelitian ini sifatnya heterogen karena istilah yang digunakan dalam penelitian ini merujuk kepada sesuatu yang berbeda-beda jenis dan karakteristiknya. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketimpangan pembangunan. Variabel independen dalam penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan, antara lain : PDRB Perkapita, jumlah penduduk, PAD, IPM dan UMK. Alat analisis yang digunakan adalah panel data dengan regresi multiple, uji t, uji f, dan Uji Koefisien Determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Ketimpangan di Provinsi Banten

Hasil perhitungan Indeks Williamson antar kabupaten/kota di Provinsi Banten dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 1. Indeks Williamson antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Berdasarkan gambar grafik tersebut adalah Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010-2011 memiliki tingkat ketimpangannya sebesar 0.23, pada tahun 2012-2015 mengalami penurunan sebesar 0.22, dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0.21. Kabupaten Lebak pada tahun 2010 memiliki tingkat ketimpangannya sebesar 0.24, pada tahun 2011-2015 mengalami penurunan sebesar 0.23, dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0.22. Kabupaten Tangerang pada tahun 2010 memiliki tingkat ketimpangan sebesar 0.21, pada tahun 2011-2012 mengalami penurunan sebesar 0.22, pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 0.23, pada tahun 2014-2015 mengalami kenaikan sebesar 0.24, dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0.25. Kabupaten Serang pada tahun 2010-2013 memiliki tingkat ketimpangan sebesar 0.11, pada tahun 2014-2016 mengalami penurunan sebesar 0.10. Kota Tangerang pada tahun 2010-2011 memiliki tingkat ketimpangan sebesar 0.03, pada tahun 2012-2016 mengalami penurunan sebesar 0.10. Kota Cilegon pada tahun 2010-2011 memiliki tingkat ketimpangan sebesar 0.45, pada tahun 2012-2013 mengalami peningkatan sebesar 0.46, dan pada tahun 2014-2014 mengalami penurunan sebesar 0.45. Kota Serang pada tahun 2010-2012 memiliki tingkat ketimpangan sebesar 0.09, dan pada tahun 2013-2016 mengalami penurunan sebesar 0.08. Kota Tangerang Selatan pada tahun 2010-2016 memiliki tingkat ketimpangan sebesar 0.11.

Analisis Regresi Faktor-faktor yang mempengaruhi Ketimpangan

Dari hasil Uji Chow dan Uji Hausman, analisis data yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah metode FEM (Fixed Effect Model). Dalam hasil analisis FEM (Fixed Effect Model) adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Output Hasil Regresi Data Panel Fixed Effect

Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob.	T tabel $\alpha = 5\%$
C	0.813970	1.471007	0.1486	2.00758
PDRB P	-0.361636	-5.904341	0.0000	2.00758
Jumlah Penduduk	0.281252	4.215168	0.0001	2.00758
PAD	0.015806	2.158909	0.0365	2.00758
IPM	0.000497	0.733972	0.4669	2.00758
UMK	0.021247	1.324712	0.1923	2.00758

Sumber : Data Diolah, 2019

Persamaan hasil regresi fixed effect adalah sebagai berikut :

$$KT = 0.813970 (c) - 0.361636 (PDRB P) + 0.281252 (JP) + 0.015806 (PAD) + 0.000497 (IPM) + 0.021247 (UMK)$$

Tabel 2. Hasil Uji F

F-hitung	F-tabel	Keterangan
3545.826	2.40	F-hitung \geq F-tabel

Sumber : Data diolah, 2019.

Nilai $df_1 = 5$ dan $df_2 = n - k - 1 = 50$ pada $\alpha = 0.05$ diperoleh nilai F-tabel 2.40 dan hasil F-hitung diperoleh nilai sebesar 3545.826, jadi nilai F-hitung $3545.826 \geq$ F-tabel 2.40. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa variabel bebas yaitu PDRB Perkapita, jumlah penduduk, PAD, IPM dan UMK berpengaruh secara serentak dan bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu Ketimpangan Pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2010-2016.

Tabel 3. Hasil Uji t

Variabel	t=hitung	t=table	Keterangan
PDRB P	-5.904341	2.00758	Signifikan
Jumlah Penduduk	4.215168	2.00758	Signifikan
PAD	2.158909	2.00758	Signifikan
IPM	0.733972	2.00758	Tidak Signifikan
UMK	1.324712	2.00758	Tidak Signifikan

Sumber: Data diolah, 2019

Dari uji t dapat disimpulkan bahwa PDRB Perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Artinya apabila 1% PDRB Perkapita mengalami kenaikan, maka ketimpangan pembangunan akan menurun sebesar 0.361%. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sultan dan Jamzani dalam jurnal Analisis Ketimpangan di DIY Jawa Tengah dan Faktor yang Mempengaruhinya Periode 2000-2014 bahwa PDRB perkapita mempunyai pengaruh negative dan signifikan terhadap ketimpangan. Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Artinya apabila jumlah penduduk naik 1%, maka akan diikuti kenaikan ketimpangan pembangunan sebesar 0.281%. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Holifah dalam jurnal Faktor-faktor Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan. PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Artinya apabila PAD naik 1%, maka akan diikuti kenaikan ketimpangan sebesar 0.015%. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Valentiana Shanty Putri dalam jurnal Pengaruh PAD, DAU, dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan. IPM memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Holifah dalam jurnal Faktor-faktor Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat bahwa IPM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan. UMK memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli dalam jurnal Pengaruh Upah Minimum Regional dan Kontribusi Sektor Industri Terhadap Ketimpangan Distribusi/Pendapatan di Sulawesi Selatan bahwa Upah Minimum Regional tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi Provinsi Sulawesi Selatan.

KESIMPULAN

Hasil Perhitungan Indeks Williamson adalah Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010-2011 memiliki tingkat ketimpangannya sebesar 0.23, pada tahun 2012-2015 mengalami penurunan sebesar 0.22, dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0.21. Kabupaten Lebak pada tahun 2010 memiliki tingkat ketimpangannya sebesar 0.24, pada tahun 2011-2015 mengalami penurunan sebesar 0.23, dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0.22. Kabupaten Tangerang pada tahun 2010 memiliki tingkat ketimpangan sebesar 0.21, pada tahun 2011-2012 mengalami penurunan sebesar 0.22, pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 0.23, pada tahun 2014-2015 mengalami kenaikan sebesar 0.24, dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0.25. Kabupaten Serang pada tahun 2010-2013 memiliki tingkat ketimpangan sebesar 0.11, pada tahun 2014-2016 mengalami penurunan sebesar 0.10. Kota Tangerang pada tahun 2010-2011 memiliki tingkat ketimpangan sebesar 0.03, pada tahun 2012-2016 mengalami penurunan sebesar 0.10. Kota Cilegon pada tahun 2010-2011 memiliki tingkat

ketimpangan sebesar 0.45, pada tahun 2012-2013 mengalami peningkatan sebesar 0.46, dan pada tahun 2014-2014 mengalami penurunan sebesar 0.45. Kota Serang pada tahun 2010-2012 memiliki tingkat ketimpangan sebesar 0.09, dan pada tahun 2013-2016 mengalami penurunan sebesar 0.08. Kota Tangerang Selatan pada tahun 2010-2016 memiliki tingkat ketimpangan sebesar 0.11.

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis tentang pengaruh PDRB Perkapita, Jumlah Penduduk, PAD, IPM, dan UMK terhadap ketimpangan di Provinsi Banten tahun 2010-2016, maka kesimpulan yang diperoleh PDRB Perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Artinya apabila PDRB Perkapita naik 1%, maka ketimpangan pembangunan akan menurun sebesar 0.361%. Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Artinya apabila Jumlah Penduduk naik 1%, maka akan diikuti kenaikan ketimpangan pembangunan sebesar 0.281%. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Artinya apabila PAD naik 1%, maka akan diikuti kenaikan ketimpangan sebesar 0.015%. IPM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. UMK memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2005). *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arsyad, L. (1997). *Ekonomi Pembangunan, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BP STIE YKPN.
- Arsyad, L. (1999). *Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima*. Yogyakarta: BP STIE YKPN
- Arsyad, L. (2004). *Ekonomi Pembangunan, Edisi Kedua*. Yogyakarta: BP STIE YKPN.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima*. Yogyakarta: BP STIE YKPN.
- Badan Pusat Statistik. *Provinsi Banten dalam angka 2010-2016*.
- Bakri, Safrizal. *Analisis Ketimpangan Pembangunan antar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan Kebijakan Penanggulangannya*.
- Bluestone, B., & Harrison, B. (2001). *Growing prosperity: The battle for growth with equity in the twenty-first century*. Univ of California Press.
- Fitrah, Sari, Islami. *Faktor-faktor Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Timur, Indonesia*.
- Fulsgang. (2013). *Ketimpangan Ekonomi*. Yogyakarta: Salemba.
- Gujarati., & Porter. (2009). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartati, S., & Iswanti, S. (2008). *Sistem pakar dan pengembangannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Holifah. *Faktor-faktor Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat*.
- Jhingan. (2010). *Indeks Pembangunan Manusia*. Jakarta: Erlangga.

- Krishna, B. S., Murty, D. S. R., & Prakash, B. S. J. (2000). Thermodynamics of chromium (VI) anionic species sorption onto surfactant-modified montmorillonite clay. *Journal of Colloid and Interface Science*, 229(1), 230–236.
- Kuncoro, M. (2001). *Metode kuantitatif: Teori dan aplikasi untuk bisnis dan ekonomi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, M. (2002). *Analisis Spasial dan Regional: Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN. Yogyakarta.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi & pembangunan daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, M. (2006). *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga.
- Levitan, S. A., & Belous, R. S. (1979). The Minimum Wage Today: How Does It Work. *Monthly Lab. Rev.*, 102, 17.
- Maipita, I. (2014). *Mengukur kemiskinan & distribusi pendapatan*. UPP STIM YKPN.
- Murty. (2000). *Ekonomi Kependudukan*. Jakarta: Erlangga.
- Natha, S., Ketut, I., & Putri, N. P. V. S. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(1).
- Nita, Tri, Hartini. Pengaruh PDRB Perkapita, Investasi, dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi DIY Tahun 2011-2015.
- Ni, Putu, Valentina. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. PDRB ADHK dari tahun 2010-2016. BPS Provinsi Banten.
- Rahman, H. (2005). *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Arifgosita. Mardiasmo Perpajakan Yogyakarta.
- Sidik, M. (2002). *Dana alokasi umum: konsep, hambatan, dan prospek di era otonomi daerah*. Penerbit Buku Kompas.
- Sukirno, S. (1997). *Pengantar Teori Mikro Ekonomi Edisi 2*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2004). *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafrizal. (2012). *Kesenjangan Ekonomi dan Konvergen*. Jakarta: Erlangga.
- Tambunan, T. H. (2001). *Perekonomian Indonesia : Teori dan temuan Empiris*. Jakarta: Salemba Empat.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan*. Jakarta: Erlangga.
- Ying. (2000). *Ketimpangan Regional*. Jakarta: Erlangga.
- Zulkifli. *Pengaruh Upah Minimum Regional dan Kontribusi Sektor Industri Terhadap Ketimpangan Distribusi/Pendapatan di Sulawesi Selatan*.